

**DAMPAK PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI
TERHADAP STRUKTUR MODAL
PT. BANK DKI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi

**TIAN SEPTIANA
0606149263**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
KEKHUSUSAN STRATEGI KEUANGAN PERUSAHAAN
JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tian Septiana

NPM : 0606149263

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Tian Septiana
NPM : 0606149263
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Tesis : Dampak Penerbitan Obligasi Subordinasi
Terhadap Struktur Modal PT. Bank DKI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Setiadi Oemar Sambudi, MBA (.....)

Penguji : Dr. Gede Harja Wasistha (.....)

Penguji : Samuel Triswandi, MM (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Januari 2010

Mengetahui,
Ketua Program

Dr. Lindawati Gani
NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya akhir ini, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S2 pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini mungkin dan pasti banyak kekurangan baik dari penulisan, penyajian, isi, pembahasan, dan bahkan pengambilan kesimpulan sehingga kurang berkenan bagi para pembaca atau yang memanfaatkan hasil karya akhir ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan atau kritikan baik bentuk maupun isinya sehingga untuk perbaikan hasil karya akhir ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini khususnya kepada:

1. Ibu Linda Gani selaku Kepala Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Bapak Setiadi Oemar Sambudi, MBA sebagai pembimbing dalam menyelesaikan karya akhir.
3. Bapak Dr. Gede Harja Wasistha dan Bapak Samuel Triswandi, MM sebagai tim penguji karya akhir.
4. Bapak Ery Sukoco, M.Ak. dan Bapak Bambang Supriyono, MM selaku pimpinan di PT. Bank DKI.
5. Para dosen yang telah menyampaikan ilmu kepada penulis selama kuliah di Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
6. Seluruh staf sekretariat dan perpustakaan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
7. Teman-teman di PT. Bank DKI.
8. Teman-teman di Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menghaturkan sembah sujud dengan rasa terima kasih yang dalam kepada istriku tercinta, mama dan papa tersayang dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan selama kuliah. Semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Jakarta, 6 Januari 2010
Penulis,

Tian Septiana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini”

Nama : Tian Septiana
NPM : 0606149263
Program Studi : Magister Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**DAMPAK PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI TERHADAP
STRUKTUR MODAL PT. BANK DKI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2010
Yang menyatakan,

(Tian Septiana)

ABSTRAK

Nama : Tian Septiana
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Dampak Penerbitan Obligasi Subordinasi Terhadap Struktur Modal PT. Bank DKI

Di era globalisasi ini, keruntuhan suatu bank, terutama yang berskala besar, akan membawa dampak buruk bagi bank-bank lainnya, yang pada akhirnya akan menimbulkan *global systemic risk*.

Untuk mengatasi hal tersebut *Basle Supervisory Committee* (BSC) pada tahun 1988 menghasilkan suatu kesepakatan yang dikenal dengan *Basle Accord* 1988 menetapkan bahwa modal bank minimum sama dengan 8% dari *weighted risk assets* yang dimiliki masing-masing bank.

Pada tahun 1996 komite melakukan amandemen terhadap *Basle Accord* 1988. Amandemen dilakukan dengan memasukkan risiko pasar sebagai dasar perhitungan kebutuhan modal minimum.

Peraturan permodalan bank di Indonesia pada prinsipnya mengakomodasi standar permodalan bank yang berlaku secara internasional. Tujuannya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional.

PT. Bank DKI memerlukan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya, Selain dari itu PT. Bank DKI sebagai bank yang beroperasi di Indonesia harus taat pada Peraturan Bank Indonesia dalam hal ini untuk memenuhi Kecukupan Modal Minimum (KPM) yang memenuhi syarat (*eligible capital*).

Dengan melihat rasio kecukupan modal yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2004 sebesar 22,87% menjadi 15,09% pada tahun 2007. Untuk memperbaiki rasio tersebut pada tahun 2008 PT. Bank DKI menerbitkan obligasi Subordinasi sebesar Rp. 325 milyar dengan jangka waktu 10 tahun.

Dengan terbitnya obligasi subordinasi tersebut PT. Bank DKI dapat menaikkan CAR dan permodalannya. Selain itu dengan terbitnya obligasi subordinasi tersebut komponen modal PT. Bank DKI dapat memenuhi Kecukupan Modal Minimum (KPM) yang memenuhi syarat (*eligible capital*).

Kata kunci : Obligasi Subordinasi, Struktur Modal

ABSTRACT

Name : Tian Septiana
StudyProgram : Magister of Accountancy
Title : The Impact of Issuance of Subordinated Debt to Capital Structure of PT. Bank DKI

In this globalization era, the collapse of banks, mostly for the big scale banks, will bring bad impact to the other banks, which finally emerge the global systematic risk.

To overcome this issue, in 1988, Basle Supervisory Committee (BSC) generated an agreement known as Basle Accord 1988, which enactive that the minimum of bank's capital at 8% from weighted risk assets of each bank.

In 1996, committee was done an amendment of Basle Accord 1988, to include the market risk as a calculation base of minimum capital's needs.

The regulation of bank's capital in Indonesia is essentially to accommodate the standard of bank's capital which is valid at international scope. The objectives are to create a health banking system and be able to compete at national or international scope.

PT. Bank DKI needs some of capital to do operational activities in order to keep the business survive. Beside that, PT. Bank DKI as a bank which is operated in Indonesia, must be obey to Regulation of Bank of Indonesia, for instance to fulfill the Minimum Capital Adequacy which is eligible capital.

The capital adequacy ratio was going down from 2004 at 22.87% become 15.09% at 2007. To improve it, then in 2008, PT. Bank DKI issued the subordinated debt in the amount of Rp. 325 billion with validity of 10 years.

Because of the issuance of this subordinated debt, PT. Bank DKI is able to increase the CAR and its capitalization. Beside that, the capital's component of PT. Bank DKI could meet the Minimum Capital Adequacy which is eligible capital.

Key words:

Subordinated Debt, Capital Structure

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	lii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR RUMUS	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Metodologi Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR	7
2.1 Fungsi dan Struktur Permodalan Bank	7
2.2 Peraturan Permodalan Bank di Indonesia	10
2.3 Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum Bank	13
2.4 Pinjaman Subordinasi	13
2.5 Rasio Keuangan	15
2.5.1 Kualitas Aktiva (<i>Assets Quality</i>)	15
2.5.2 Profitabilitas/Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	15
2.5.3 Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	16
BAB 3 PERBANKAN INDONESIA DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	17
3.1 Perkembangan Makro Ekonomi	17
3.2 Perkembangan Perbankan Indonesia	18
3.3 Sejarah Singkat Perusahaan	20
3.4 Visi dan Misi Perusahaan	21
3.5 Perkembangan Usaha PT. Bank DKI	22
3.6 Obligasi Subordinasi PT. Bank DKI	26
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Struktur Modal PT. Bank DKI	28
4.2 Penerbitan Obligasi Subordinasi PT. Bank DKI	30
4.2.1 Sebelum Penerbitan Obligasi Subordinasi	31
4.2.2 Setelah Penerbitan Obligasi Subordinasi	33
4.2.3 Asumsi bila tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi	36

4.3 Keuangan PT. Bank DKI	37
4.3.1 Pendapatan Bunga	38
4.3.2 Beban Bunga	38
4.3.3 Pendapatan Bunga Bersih	39
4.3.4 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	40
4.3.5 Laba (Rugi) Operasional	41
4.3.6 Laba (Rugi) Bersih	41
4.3.7 Kredit Yang Diberikan	41
4.3.8 Kualitas aktiva (Assets Quality)	42
4.3.9 Earnings (Profitabilitas/Rentabilitas)	43
4.3.10 <i>Loan Deposit Ratio</i> (LDR)	45
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52

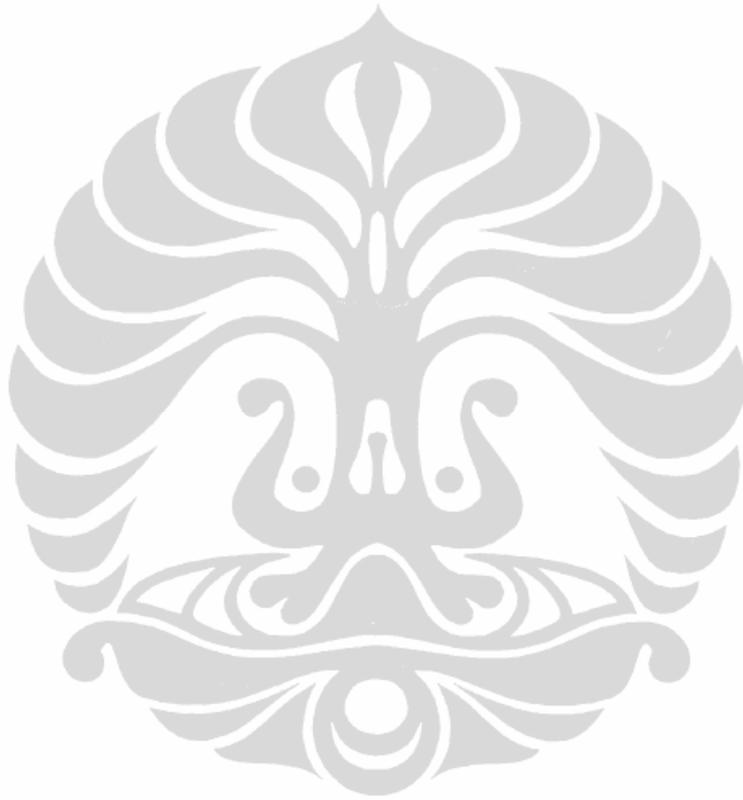


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Dana Pihak Ketiga	23
Tabel 4.1. Komponen Modal PT Bank DKI Per 31 Desember 2007	29
Tabel 4.2. Perhitungan CAR dengan Risiko Pasar per 31 Desember 2007	30
Tabel 4.3. Rasio kecukupan modal (CAR) PT. Bank DKI 2004 – 2007 ...	30
Tabel 4.4. Perhitungan Kapasitas Penerbitan Obligasi Subordinasi	31
Tabel 4.5. Perhitungan Modal yang Memenuhi Syarat (<i>Eligible Capital</i>) Per 31 Desember 2007 (Rp. Juta)	32
Tabel 4.6. Komponen Modal PT Bank DKI	34
Tabel 4.7. CAR PT. Bank DKI	35
Tabel 4.8. Modal Yang Memenuhi Syarat (<i>Eligible Capital</i>)	35
Tabel 4.9. Modal Yang Memenuhi Syarat (<i>Eligible Capital</i>) dengan Asumsi tidak menerbitkan obligasi subordinasi	37
Tabel 4.10. Komposisi Pendapatan dan Beban Bunga untuk periode yang berakhir 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 2007, 2006 (dalam jutaan Rp)	38
Tabel 4.11. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006	40
Tabel 4.12. Total Kredit Yang Telah Disalurkan PT. Bank DKI Periode 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006	41
Tabel 4.13. Kualitas Aktiva PT. Bank DKI	42
Tabel 4.14. Profitabilitas PT. Bank DKI	43

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1. <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	13
--	----



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan 3



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perhitungan Modal yang Memenuhi Syarat per 31 Desember 2008
- Lampiran 2. Perhitungan Modal yang Memenuhi Syarat per 30 Juni 2009
- Lampiran 3. Perhitungan Modal yang memenuhi syarat per 31 Desember 2008 dengan asumsi PT. Bank DKI tidak menerbitkan obligasi subordinasi
- Lampiran 4. Perhitungan Modal yang memenuhi syarat per 30 Juni 2009 dengan asumsi PT. Bank DKI tidak menerbitkan obligasi subordinasi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam lima tahun ke depan, diperlukan pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya. Selain hambatan dalam hal permodalan bank, penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat oleh keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen risiko dan *core banking skill* yang relatif belum baik, serta biaya operasional yang relatif tinggi.

Bersumber dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id) oleh Biro Stabilitas Sistem Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengateran Perbankan (2009: Hal. 38) Sampai dengan Juni 2009 perbankan masih terus memiliki permodalan yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR) yang jauh di atas batas minimum 8% yang dipersyaratkan, mencapai 17,0% per akhir Juni 2009. Angka ini turun tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 17,3%, menyusul kenaikan kredit yang cukup tinggi selama bulan Juni 2009. Sementara itu, rasio modal inti terhadap ATMR mencapai 15,6%, atau juga berada jauh di atas batas minimum sebesar 5% sesuai ketentuan.

Aspek permodalan masih menjadi permasalahan utama perbankan nasional, berpijak dari adanya kebutuhan *blue print* perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. API melalui program penguatan struktur perbankan nasional bertujuan memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko,

mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan.

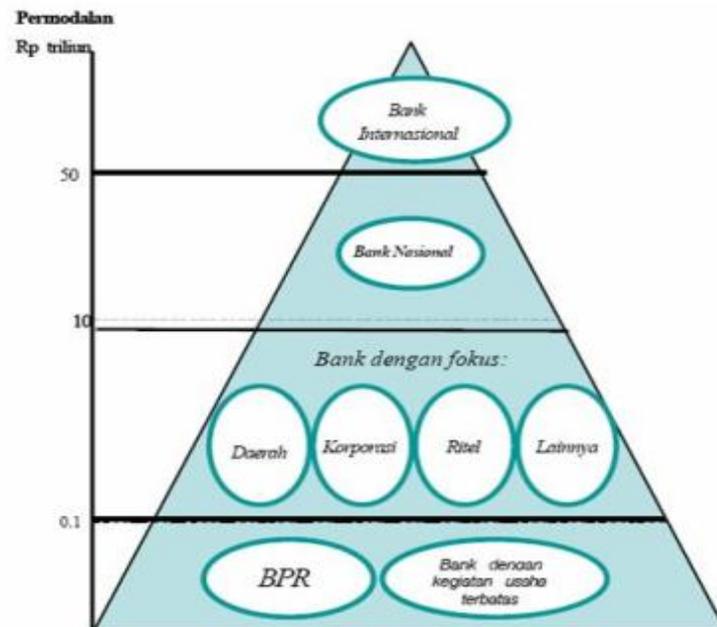
Bersumber dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id) oleh Tim Arsitektur Perbankan Indonesia (2007: Hal: 2) Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian dilakukan melalui:

- a. Penambahan modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru.
- b. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru.
- c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal.
- d. Penerbitan *subordinated loan*.

Dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan, program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:

- a. Bank yang beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun, diperkirakan dua sampai tiga bank.
- b. Bank yang beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun, diperkirakan tiga sampai lima bank.
- c. Bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun diperkirakan tiga puluh sampai lima puluh bank.
- d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.

Struktur Perbankan Indonesia Dalam Kurun Waktu Sepuluh Sampai Lima Belas Tahun Kedepan

Sumber: Tim Arsitektur Perbankan Indonesia (2007)

Sementara itu, terkait dengan ketentuan yang mensyaratkan Modal Inti minimum bank sebesar Rp100 miliar pada akhir tahun 2010, maka per akhir Juni 2009 terdapat 15 bank yang modal intinya belum memenuhi persyaratan minimum tersebut, meskipun dari segi ketentuan CAR minimum 8% tidak ada yang melanggar. Namun demikian, belajar dari pengalaman pemenuhan ketentuan Modal Inti minimum bank sebesar Rp80 miliar pada akhir 2008, diperkirakan seluruh bank juga akan berhasil memenuhi ketentuan Modal Inti minimum sebesar Rp100 miliar tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Penerbitan obligasi subordinasi dapat memberikan manfaat, terutama dalam hal pemenuhan rasio kecukupan modal, namun obligasi subordinasi merupakan instrumen hutang jangka waktu jatuh temponya yang relatif panjang, sehingga memiliki risiko suku bunga.

Risiko suku bunga ini terutama berkaitan dengan penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi subordinasi. Apabila dana tersebut ditempatkan dalam bentuk surat berharga, maka yang disebut risiko adalah variasi dari tingkat pengembalian (*rate of return*) investasi tersebut. Variasi tingkat pengembalian disebabkan oleh perubahan suku bunga yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ini merupakan salah satu risiko yang sangat signifikan dihadapi oleh lembaga keuangan pada masa kini.

PT. Bank DKI diproyeksikan akan terus meningkatkan pemberian kredit sehingga untuk mendukung rencana tersebut diperlukan dana yang cukup. Hal tersebut mengacu pada prinsip pembiayaan yang moderat bahwa penggunaan dana jangka panjang harus dengan sumber dana jangka panjang pula. Mengingat posisi sumber dana yang dimiliki Bank DKI sebagian besar berupa dana jangka pendek, maka penerbitan obligasi subordinasi dipandang perlu dan ditujukan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan modal perusahaan
- b. Memperoleh sumber pendanaan jangka panjang guna pembiayaan ekspansi kredit
- c. Memperbaiki struktur keuangan perusahaan sehingga kesenjangan (*gap*) antara dana jangka pendek dengan dana jangka panjang menjadi lebih baik
- d. Mempertahankan posisi CAR di atas batas minimal yang ditetapkan Bank Indonesia
- e. Memaksimalkan nilai perusahaan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah dapat dikemukakan identifikasi atau rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah obligasi subordinasi yang diterbitkan PT. Bank DKI sudah memenuhi syarat yang ditetapkan BI sebagai modal tambahan?
- b. Seberapa besar dampak penerbitan obligasi subordinasi terhadap permodalan PT. Bank DKI?
- c. Bagaimana kondisi keuangan sebelum dan setelah penerbitan obligasi subordinasi?

- d. Apa dampak yang signifikan dari penerbitan obligasi subordinasi?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini membatasi pada bahasan analisis terhadap perubahan struktur modal PT. Bank DKI akibat penerbitan Obligasi Subordinasi I.

1.4 Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui struktur permodalan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar.
- b. Mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh struktur permodalan PT. Bank DKI sebelum dan sesudah penerbitan obligasi subordinasi.
- c. Mengetahui kondisi keuangan PT. Bank DKI sebelum dan setelah penerbitan obligasi subordinasi.
- d. Mengetahui dampak yang signifikan dari penerbitan obligasi subordinasi.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam menyusun karya akhir ini, memperoleh data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan karya akhir ini disusun berdasarkan studi literatur dan survey perusahaan. Studi literatur didapatkan dari buku referensi, jurnal penelitian, artikel dan penelusuran data atau informasi dari beberapa situs internet.

- b. Studi Lapangan (*Field Reseach*)

Sedangkan survey perusahaan dilakukan di Grup Tresuri, Kantor Pusat PT. Bank DKI, untuk mendapatkan data-data sekunder berupa laporan keuangan dan publikasi lain terkait dengan Bank DKI.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Akhir ini disusun dalam lima bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang karya akhir ini penulis mencoba untuk menjelaskan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik karya akhir. yang meliputi alasan pemilihan judul, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi landasan teori yang penulis gunakan dalam pembahasan berikutnya, penulis menguraikan tentang fungsi dan struktur permodalan, teori Obligasi Subordinasi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permodalan.

BAB III. PERBANKAN INDONESIA DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang kondisi industri perbankan di Indonesia dan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah singkat, ruang lingkup usaha dan kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisa struktur modal PT. Bank DKI sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi I. Selanjutnya bab ini menguraikan perhitungan modal yang memenuhi syarat (*eligible capital*).

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan mengenai pengaruh penerbitan obligasi subordinasi terhadap struktur modal PT. Bank DKI dan modal yang memenuhi syarat. Berdasarkan kesimpulan tersebut disampaikan beberapa saran, khususnya mengenai penggunaan dana yang bersumber dari penerbitan obligasi subordinasi.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1. Fungsi dan Struktur Permodalan Bank

Menurut Matten (2000) tujuan utama permodalan dalam suatu lembaga keuangan (*financial institution*) adalah untuk menyerap risiko finansial, bukan untuk mendanai aset bisnis. Kelebihan aset bank dibandingkan dengan aset perusahaan lainnya adalah kemampuan menyerap dan memindahkan risiko. Modal suatu bank dapat dianggap sebagai penyangga (*buffer*) untuk menutup hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan dan memberikan kesempatan kepada bank untuk melanjutkan operasi. Dengan kata lain peran modal di dalam suatu bank adalah sebagai penyangga kerugian di masa datang yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta memberikan ruang bagi bank untuk memulihkan keterpurukan. Hal lain yang membuat permodalan bank begitu penting adalah tujuan utama dari pengawasan perbankan di seluruh dunia, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pengawas perbankan berkewajiban menjamin bahwa sistem keuangan tidak akan runtuh (*collapse*). Pada masa lalu, mekanisme utama yang dilakukan oleh pengawas perbankan adalah bertindak sebagai *the lender of the last resort*. Apabila suatu bank *collapse*, maka bank sentral sebagai *the lender of the last resort* akan menyediakan bantuan likuiditas dan menjamin bahwa bank tersebut akan tetap bertahan.

Bank sentral perlu bertindak sebagai *the lender of the last resort* karena secara teoretis keruntuhan suatu bank, terutama yang berskala besar, akan membawa dampak buruk bagi bank-bank lainnya. Hal ini semacam efek domino, karena setiap bank di dalam suatu sistem keuangan berhubungan dengan bank lainnya, dan efeknya akan menyerupai reaksi mata rantai (*chain reaction*).

Untuk mengantisipasi kondisi buruk tersebut, pada pertengahan tahun 1980-an bank-bank komersial di Amerika Serikat telah mulai menyediakan cadangan bagi pinjaman bermasalah (*bad debts*) dan kerugian lainnya. Begitu juga dengan pemerintah dan bank sentral, yang mencoba membatasi skala dan cakupan dari kehancuran bank, serta menjamin kepercayaan kepada sistem perbankan dengan menekankan pada persyaratan modal minimum bagi masing-masing bank.

Pada awalnya pengawasan perbankan didasarkan pada kebijakan pengawasan dari masing-masing otoritas pengawasan. Itu sebabnya kebijakan pengawasan menjadi berbeda-beda antara otoritas yang satu dengan otoritas lainnya. Namun timbulnya kesadaran bahwa *global systemic risk* akan dapat di atasi bila para pengawas perbankan di masing-masing negara mengikuti standar kebijakan pengawasan yang berlaku secara internasional, telah mendorong perubahan yang mendasar dalam regulasi perbankan.

proses perubahan itu dimulai ketika *Cooke Committee*, yang dibentuk di bawah payung *Bank for International Settlement (BIS)*, mengajukan proposal tentang ketentuan umum standar permodalan bank yang berlaku secara internasional. Selanjutnya komite ini menjadi *Basle Supervisory Committee (BSC)*, yang terdiri dari bank sentral dan pengawas perbankan negara-negara G10 dan Luxembourg Prabowo (2003: Hal.13).

Pada tahun 1988 komite menghasilkan suatu kesepakatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan bank, dengan memberikan metodologi umum untuk pengukuran risiko dan perhitungan kebutuhan modal minimum. Kesepakatan yang dikenal dengan *Basle Accord 1988*, menekankan pada jumlah modal minimum yang harus dimiliki bank untuk menghadapi eksposur dari *counterparties* bank.

Basle Accord 1988 menetapkan bahwa modal bank minimum sama dengan 8% dari *weighted risk assets* yang dimiliki masing-masing bank. Sedangkan yang dimaksud dengan modal bank terdiri dari dua komponen Prabowo (2003: Hal.13)

- a. *Tier 1*, merupakan modal inti yang terdiri dari ekuitas (*equity*) dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*). Pada prinsipnya *tier 1* merupakan komponen modal yang dapat segera menyerap kerugian.
- b. *Tier 2*, adalah modal pelengkap (*supplementary capital*) yang terdiri *undisclosed reserves*, pinjaman subordinasi dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari lima tahun, *perpetual debt securities* dan *unrealized gain* dari investasi.

Meskipun *Basle Accord* 1988 telah memberikan dasar penetapan kebutuhan modal minimum, namun menurut Best (1998) masih dirasakan adanya beberapa kelemahan, terutama dalam hal pengukuran risiko yaitu:

a. Pengabaian kualitas kredit

Terhadap seluruh eksposur *corporate counterparties* dikenakan bobot risiko 100%, tanpa memperhatikan kualitas kredit dari masing-masing *counterparty*. Hal ini dapat menimbulkan *disincentive* bagi bank untuk menjaga kualitas kreditnya.

b. Tidak ada efek diversifikasi

Bank pada dasarnya dapat mengurangi seluruh risiko yang dihadapinya dengan mendiversifikasikan eksposur kredit ke berbagai jenis industri atau negara. Pengurangan risiko sebagai efek diversifikasi terabaikan dalam *Basle Accord* 1988, sehingga tidak menimbulkan insentif bagi bank untuk melakukannya.

c. Tidak ada proteksi terhadap risiko pasar

Basle Accord 1988 belum mensyaratkan pencadangan modal untuk menutup potensi kerugian dari risiko pasar.

Berdasarkan kritik tersebut, pada tahun 1996 komite melakukan amandemen terhadap *Basle Accord* 1988. Amandemen dilakukan dengan memasukkan risiko pasar sebagai dasar perhitungan kebutuhan modal minimum. Dengan memasukkan risiko pasar ke dalam ketentuan permodalan bank, maka diperlukan tambahan modal yang hanya dapat digunakan untuk menutup risiko pasar.

Modal ini disebut sebagai *tier 3* atau modal pelengkap tambahan. Jumlah modal yang bersumber dari *tier 3* dibatasi dengan ketentuan bahwa jumlah *tier 3* maksimum 250% dari *tier 1* yang dialokasikan untuk risiko pasar. Instrumen keuangan yang dapat dikategorikan sebagai *tier 3* adalah *subordinated debt* dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari dua tahun.

2.2. Peraturan Permodalan Bank di Indonesia

Peraturan permodalan bank di Indonesia pada prinsipnya mengakomodasi standar permodalan bank yang berlaku secara internasional. Tujuannya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Peraturan ini menetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari aktiva tertimbang menurut risiko terhitung sejak akhir Desember 2001. Bagi bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan ditempatkan dalam pengawasan khusus.

Melalui peraturan ini, Bank Indonesia juga menetapkan tiga komponen modal yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, yaitu:

- a. Modal inti (*tier 1*), bank wajib menyediakan modal inti paling kurang 5% (lima persen) dari ATMR. Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari modal disetor, cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) dan modal inovatif (*innovative capital instrumen*). Modal inti ini harus diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*. Aset tidak berwujud lainnya dan faktor pengurang modal inti seperti penyertaan, kekurangan modal (*shortfall*) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh bank dan eksposur sekuritas.

Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan tambahan modal terdiri dari:

1. Faktor penambah: agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan sebesar 50 %, selisih lebih penjabaran laporan keuangan, dana setoran modal, waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham bank sebesar 50% (lima puluh persen) dan opsi saham yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Faktor pengurang: disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan, pendapatan komprehensif lainnya yang negative, selisih kurang antara penyisihan penghapusan asset atas asset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan atas asset produktif dan selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *trading book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Modal inovatif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal inti.

- b. Modal Pelengkap (*tier 2*), merupakan komponen modal bank yang jumlahnya maksimum 100% dari Modal Inti, modal pelengkap ini terdiri dari modal pelengkap level atas (*upper tier 2*) dan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*). Modal pelengkap level atas (*upper tier 2*) terdiri dari:

1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan.
2. Bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti.
3. Revaluasi aset tetap.
4. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, setinggi-tingginya 1,25 % dari aktiva tertimbang menurut risiko
5. Pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti. Modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Diterbitkan dan telah dibayar penuh.
2. Memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 5 (lima) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
3. Tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian.

4. Pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*).
 5. Tidak diproteksi maupun dijamin oleh bank atau perusahaan anak.
 6. Apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*) harus memenuhi persyaratan tertentu.
 7. Telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
- c. Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar, *tier 3* tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari modal inti yang dialokasikan untuk risiko pasar. Jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi 100% (seratus persen) dari modal inti.

Peraturan permodalan tersebut pada dasarnya hanya memperhitungkan risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan standar permodalan bank yang berlaku secara internasional, maka diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 tanggal 1 Nopember 2007.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank-bank yang diwajibkan memenuhi penyediaan modal dengan memperhitungkan risiko pasar sebesar 8%, pemenuhan kewajiban tersebut tidak menghilangkan kewajiban bank memenuhi kecukupan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank adalah risiko suku bunga (*interest rate risk*) dan/atau risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*). Bank-bank yang wajib memenuhi KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar adalah:

- a. Bank dengan total aktiva sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;

- b. Bank Devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif dalam trading book sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih;
- c. Bank bukan bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif suku bunga dalam *trading book* sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

2.3. Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum Bank

Kebutuhan modal minimum bank ($CAR = \text{capital adequacy ratio}$) dapat dinyatakan dengan rumus Supriyono (2009: Hal. 27):

$$CAR = \frac{C}{ATMR} \times 100 \% \quad (2.1)$$

Dengan:

CAR = rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*)

C = modal

$ATMR$ = aktiva tertimbang menurut risiko

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan aktiva yang mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun rekening administratif, yang sudah ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri maupun yang berkaitan dengan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan. Untuk kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, beban risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap yang bersangkutan.

2.4. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi (*subordinated debt*) dapat dimasukkan sebagai komponen modal bank, karena memiliki jangka waktu jatuh tempo yang relatif panjang dan permanen. Meskipun demikian instrumen hutang ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *tier 1*, karena pada akhirnya akan jatuh tempo, tidak seperti saham biasa (*common stock*).

Menurut Syahrudin (2003) ada beberapa hal yang mendorong maraknya penerbitan obligasi subordinasi perbankan, yaitu:

- a. Pertama, faktor ketepatan waktu (*market timing*) yang merupakan salah satu alasan utama penerbitan obligasi subordinasi. Turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah membuka akses perbankan terhadap pendanaan jangka panjang.
- b. Kedua, penerbitan obligasi subordinasi adalah konsekuensi logis dari upaya perbankan untuk mengurangi *maturity mismatch* antara asset dan kewajibannya. Dengan memperpanjang tenor kewajiban, maka risiko *maturity mismatch* akan berkurang.
- c. Ketiga, obligasi subordinasi termasuk dalam perhitungan modal bank, sehingga penerbitan obligasi tersebut merupakan alternatif memperkuat rasio kecukupan modal bank.
- d. Keempat, menciptakan disiplin pasar, yang intinya menekankan pada pentingnya keterbukaan (*disclosure*) untuk mendorong terciptanya praktek pengelolaan bank yang *prudent* dan baik.

Untuk dapat diterima oleh *regulator* sebagai komponen modal bank, pinjaman subordinasi harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, bank harus mendahulukan tagihan deposan dari pada tagihan *debt holders*. Kedua, jangka waktu jatuh tempo minimal lima tahun, dan terdapat mekanisme diskon sebesar 20% per tahun untuk *subordinated debt* dengan sisa jangka waktu kurang dari lima tahun. Ketiga, untuk melakukan *redemption* terhadap *subordinated debt* diperlukan ijin dari pengawas perbankan.

Pengakuan obligasi subordinasi sebagai bagian dari total modal memberikan insentif bagi bank untuk mengeluarkan instrumen ini. Meskipun demikian, dalam *Basel Accord* juga disebutkan sejumlah batasan bagi obligasi subordinasi. Pertama, *subdebt* diakui hanya 50% dari total modal inti (*tier 1*). Kedua, *subdebt* masuk kedalam *tier 2* bawah. Modal *tier 2* dibatasi maksimal 100% dari modal *tier 1*. *Tier 2* terbagi menjadi dua kategori *tier 2* atas, dibatasi hingga 100 % dari modal *tier 1* dan *tier 2* bawah, dibatasi hingga 50 % dari modal *tier 1*.

Meskipun peraturan ini tidak berdampak langsung pada *subdebt*, bank dengan jumlah elemen modal *tier 2* yang cukup besar selain jumlah *subdebt*-nya, akan berkurang keinginannya untuk mengeluarkan *subdebt*.

2.5 Rasio Keuangan

2.5.1 Kualitas Aktiva (*Assets Quality*)

Kualitas aktiva, dalam hal ini adalah Kualitas Aktiva Produktif, merupakan tingkat atau ukuran kemampuan aktiva yang dapat menghasilkan. Aktiva Produktif terdiri dari penempatan kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan, penyertaan saham pada perusahaan lain serta komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko kredit, yang dapat menghasilkan pendapatan.

Kualitas Aktiva Produktif digolongkan atas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Aktiva Produktif Bermasalah terdiri dari Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penggolongan ini ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen Perseroan, terutama terhadap prestasi dan kemampuan bayar nasabah atau debitur.

Berdasarkan penggolongan atas Kualitas Aktiva Produktif tersebut dilakukan pembentukan Penyisihan Kerugian atas Aktiva Produktif yang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 yang umumnya disebut Penyisihan Aktiva Produktif (PPA) yang Wajib Dibentuk.

2.5.2 Profitabilitas/Rentabilitas (*Earnings*)

Profitabilitas atau Rentabilitas menunjukkan kemampuan perseroan dalam mendapatkan laba. Rasio-rasio yang biasanya dipergunakan untuk mengukur adalah:

- a. ROA (*Return On Assets*) atau Rasio Laba terhadap rata-rata aktiva adalah laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aktiva.
- b. ROE (*Return On Equity*) atau Rasio Laba terhadap Ekuitas adalah laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata ekuitas.

- c. NIM (*Net Interest Margin*) atau Rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap Pendapatan Bunga adalah pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif.
- d. BOPO atau Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional diperoleh dari total beban operasional dibagi dengan total pendapatan.

2.5.3 Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas Dana Pihak Ketiga dan hutang lainnya dalam Aktiva Produktif. Salah satu ukuran Likuiditas Perseroan adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*/Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga).



BAB 3

PERBANKAN INDONESIA DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Perkembangan Makro Ekonomi

Bersumber dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id) oleh Biro Stabilitas Sistem Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengateran Perbankan (2009: Hal. 3) krisis keuangan global masih merupakan sumber instabilitas yang paling utama. Meskipun dampak krisis global terhadap Indonesia relatif terbatas, namun dengan belum berakhirnya krisis tersebut, maka kemungkinan sektor keuangan domestik mengalami *shock* atau tekanan selalu terbuka. Selama ini, krisis global paling dirasakan dampaknya oleh sektor-sektor yang terkait langsung dengan transaksi internasional seperti usaha ekspor dan impor. Dengan berlarut-larutnya penyelesaian krisis global, ada kemungkinan sektor-sektor yang tidak terkait langsung dengan bisnis internasional, juga akan kena imbas. Hal ini ini perlu diwaspadai antara lain dengan memantau secara seksama perkembangan kinerja debitur pada setiap bank.

Secara keseluruhan perekonomian dunia pada tahun 2009 diperkirakan akan tumbuh negatif 1,4% namun akan mulai membaik pada tahun 2010 menjadi 2,5%. Menurunnya aktivitas ekonomi di negara-negara maju berdampak kepada turunnya volume perdagangan dunia. Setelah mencapai pertumbuhan rata-rata 8,1% selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2008 volume perdagangan dunia menurun tajam menjadi sebesar 4,1% dan bahkan diperkirakan akan mengalami kontraksi menjadi sekitar -9% pada tahun 2009. Lebih lanjut, kondisi ini menyebabkan turunnya harga-harga komoditas di pasar internasional. Harga minyak dunia yang dalam lima tahun terakhir terus meningkat, bahkan sempat mencapai USD147/barel pada bulan Juli 2008, menurun tajam hingga mencapai USD41,7/barel pada bulan Januari 2009.

Penurunan harga minyak ini kemudian diikuti oleh penurunan harga komoditas lainnya, terutama logam, mineral, dan produk pertanian. Namun demikian, memasuki akhir semester I 2009, harga minyak dunia kembali bergerak naik sehingga pada bulan Juni 2009 mencapai level USD69,9/barel. Kenaikan ini juga mulai diikuti oleh beberapa komoditas lainnya seperti minyak sawit,

aluminium, tembaga dan timah. Penurunan permintaan terhadap barang dan jasa, khususnya dari negara-negara maju (AS dan Uni Eropa) yang selama ini menjadi pasar ekspor utama negara-negara *emerging market* yang disertai dengan penurunan harga komoditas di pasar global menyebabkan turunnya kinerja ekspor negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia.

Pada bulan Juni 2009, nilai ekspor non migas Indonesia hanya sebesar USD7,6 milyar atau turun 21,7% dibandingkan nilai ekspor non migas pada bulan Juni 2008 yang sebesar USD9,7 milyar. Mengingat pendapatan negara-negara *emerging market* banyak bergantung dari hasil ekspor, penurunan kinerja ekspor tersebut menjadi faktor pendorong turunnya pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Meskipun mengalami perlambatan, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2009 masih tumbuh cukup kuat (4,0%) dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Korea Selatan dan Thailand yang justru mengalami pertumbuhan negatif. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China dan India juga menunjukkan penurunan tetapi masih cukup tinggi (di atas 5%) dibandingkan negara-negara Asia lainnya.

3.2 Perkembangan Perbankan Indonesia

Bersumber dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id) oleh Biro Stabilitas Sistem Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengateran Perbankan (2009: Hal. 23), sampai Juni 2009 total aset bank umum mengalami peningkatan sebesar Rp186,4 triliun (8,1%) menjadi Rp2.496,9 triliun. 15 (Lima belas) bank besar tetap menguasai sebagian besar (71%) total aset industri dengan pertumbuhan pada periode yang sama mencapai Rp165,8 triliun (10,4%) menjadi Rp1.759,5 triliun. Dalam satu semester, perbankan berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp71,0 triliun atau naik 4,1% hingga mencapai Rp1.824,3 triliun. Peningkatan tersebut terjadi pada semua komponen, baik giro, tabungan, maupun deposito, dengan peningkatan terbesar pada deposito sebesar Rp37,4 triliun (4,5%). Sementara giro dan tabungan masing-masing meningkat sebesar Rp17,1 triliun (4,0%) dan Rp16,4 triliun (3,3%).

Peningkatan DPK yang terjadi di tengah trend penurunan suku bunga, menunjukkan masih tingginya minat dan kebutuhan masyarakat untuk menanamkan dana di perbankan. Per Juni 2009, jumlah penanaman bank pada instrumen likuid yang meliputi SBI, SUN, dan Fasbi/FTK mencapai Rp547,7 triliun atau 23,3% dari total aset perbankan. Jumlah tersebut naik sebesar Rp34,6 triliun (6,7%) dibandingkan posisi Desember 2008. Dengan demikian, likuiditas perbankan relatif mencukupi untuk menopang kegiatan usahanya, apalagi selama semester I 2009 pertumbuhan kredit juga tergolong rendah. Sementara itu, selama periode laporan terlihat adanya *switching* penanaman dari instrumen yang sangat likuid, yaitu Fasbi/FTK kepada SBI dan SUN. Dalam kaitan ini penanaman bank pada Fasbi/FTK menurun sebesar 18,5%, sementara penempatan pada SBI dan SUN masing-masing naik sebesar 10,1% dan 3,7%.

Peningkatan preferensi penempatan pada instrumen dengan jangka waktu lebih panjang merupakan salah satu indikasi bahwa secara umum kondisi likuiditas industri perbankan semakin terkendali. Selain itu, sifat SBI dan SUN yang dapat direpokan setiap saat, menjadikan kedua instrumen tersebut semakin menarik. Alat likuid bank masih terkonsentrasi pada kepemilikan oleh kelompok bank Persero dan bank Swasta, dengan jumlah mencapai 78,8% dari total alat likuid perbankan. Namun, terlihat adanya perbedaan preferensi penempatan likuiditas pada kedua kelompok bank tersebut. Sekitar 71,0% dari alat likuid yang dimiliki oleh bank Persero ditempatkan dalam bentuk SUN, sementara pada kelompok bank Swasta, mayoritas penempatan likuiditas adalah pada SBI. Kecenderungan yang sama dengan kelompok bank Swasta juga terlihat pada kelompok BPD dan bank Campuran. Sedangkan pada Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), penempatan pada SUN sedikit lebih mendominasi.

Sejak awal 2009, pertumbuhan kredit cenderung relatif datar, sehingga sampai dengan akhir bulan Juni secara *year to date* kredit hanya tumbuh sebesar Rp27,7 triliun atau 2,1%. Selama semester I 2009, pertumbuhan kredit yang cukup tinggi hanya terjadi pada bulan Juni 2009, yaitu sebesar Rp30,1 triliun. Namun demikian peningkatan kredit tersebut, seperti juga pada bulan sebelumnya, lebih terpusat pada kelompok bank Persero dan BPD sedangkan pada kelompok bank lainnya belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kinerja

pertumbuhan kredit selama paruh pertama 2009 yang cenderung lambat ini cukup kontras jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan pertumbuhan kredit sebesar Rp146,3 triliun.

3.3 Sejarah Singkat Perusahaan

Perseroan pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat dihadapan Eliza Pondaag, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, kedudukan hukum Perseroan dirubah dan dialihkan dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (BPD Jaya) yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Pem.10/87/1-858-SK. Tanggal 5 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 1979 Seri D No. 11 tanggal 2 Mei 1979 serta sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 merubah nama menjadi Bank DKI dan merubah modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000,- menjadi sebesar Rp300.000.000.000,- sampai dengan tanggal 5 Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000,-

3.4 Visi dan Misi Perusahaan

Bank DKI mempunyai visi menjadi Bank terbaik yang membanggakan dalam rangka mewujudkan visinya Bank DKI menetapkan misi perusahaan, bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi *stakeholder* melalui pelayanan terpadu dan profesional.

Sepanjang tahun 2008, Bank DKI tetap fokus pada empat segmen utama yang memberi peluang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi Bank DKI, yaitu:

- a. Segmen pekerjaan umum dan pengembangan infrastruktur di wilayah DKI Jakarta Raya dan sekitarnya. Segmen ini merupakan bidang perbankan yang digeluti Bank DKI sejak awal pendiriannya, dan merupakan salah satu misi utama Bank DKI sebagai bank pembangunan daerah. Hingga akhir tahun 2008, segmen bisnis ini masih mendominasi kegiatan perbankan Bank DKI dan memberi kontribusi pendapatan terbesar.
- b. Segmen perbankan konsumen. Segmen ini mencerminkan beberapa upaya terobosan Bank DKI seperti layanan kartu perbankan JakCard serta penggarapan segmen pasar khusus (*niche market*) yang terdiri dari para guru sekolah dan dosen perguruan tinggi se DKI Jaya yang jumlahnya lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang. Segmen perbankan konsumen juga terdiri dari layanan pembiayaan perumahan yang tumbuh pesat. Pada tahun 2008, segmen ini mencatat tingkat pertumbuhan yang tertinggi diantara berbagai segmen perbankan yang dilayani Bank DKI.
- c. Segmen perbankan komersial ritel. Segmen ini melayani sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan merupakan wujud komitmen Bank DKI mendukung program pembangunan DKI Jaya yang juga mencakup upaya pemberdayaan perekonomian rakyat melalui pengembangan sektor UMKM. Khusus untuk usaha mikro dan kecil, kegiatan Bank DKI tidak berhenti disegi pembiayaan semata, tapi juga turut berperan sebagai penasehat/pembimbing pendirian usaha baru maupun pengembangannya. Pada tahun 2008, segmen komersial ritel menunjukkan tingkat pertumbuhan yang menggembirakan.

- d. Segmen perbankan syariah. Segmen ini melayani kebutuhan masyarakat akan manfaat pelayanan perbankan yang berbasis syariah Islam, sekaligus juga mengisi salah satu segmen pasar yang tumbuh secara pesat dalam beberapa tahun ini. Dalam hal ini Bank DKI berpartisipasi langsung dalam upaya mengembangkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia, seiring dengan sasaran pertumbuhan yang telah dicanangkan Bank Indonesia.

Keempat segmen perbankan ini memberikan peluang pertumbuhan yang berkesinambungan bagi Bank DKI, terutama pada segmen pengembangan infrastruktur DKI Jakarta, Bank DKI telah menjalin hubungan yang akrab dengan sebagian besar kontraktor pekerjaan umum yang menjadi kepercayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.5 Perkembangan Usaha PT. Bank DKI

a. Pertumbuhan Aset

Total aktiva Bank DKI meningkat sebesar 14,44% dari Rp11,8 triliun pada akhir tahun 2007 menjadi Rp13,5 triliun pada akhir tahun 2008. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan dari Rp4,8 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp6,2 triliun pada tahun 2008. Bank DKI mengurangi dana yang ditempatkan pada bank lain dan Bank Indonesia agar dapat lebih melayani kebutuhan masyarakat melalui kredit yang diberikan. Serta untuk membuktikan fungsi intermediasi Bank DKI, dana yang ditempatkan pada bank lain dan Bank Indonesia mencapai Rp661,2 miliar pada akhir tahun 2008, menurun sebesar 63,86% dari Rp1,8 triliun pada tahun 2007.

Bank DKI senantiasa menjalankan prinsip keberhati-hatian dan pengenalan terhadap nasabah yang mendalam sebagai dasar pemberian kredit dan pembiayaan. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) secara netto pada akhir Desember 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar 2,05% dan 0,74%; sedangkan NPL secara gros akhir Desember 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar 4,92% dan 4,15%. Kenaikan NPL baik pada tingkat gros maupun netto. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi secara global mengalami guncangan yang hampir dialami oleh Perbankan. Namun Bank DKI masih dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dari tahun sebelumnya. Bank DKI menyisihkan cadangan kerugian

atas piutang ragu-ragu untuk tahun 2008 sebesar Rp229,91 miliar. Jumlah ini turun dari cadangan kerugian serupa pada tahun 2007 sebesar Rp233,8 miliar rupiah. Penurunan ini mencerminkan mutu portofolio kredit yang membaik di tahun 2008.

b. Dana Pihak Ketiga

Secara keseluruhan, total DPK Bank DKI untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp9,68 triliun meningkat 33,027% dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2007 sebesar Rp7,28 triliun. Komposisi DPK Bank DKI pada tahun 2008 dapat terjaga dengan baik dan sehat. Adapun porsi terbesar diperoleh dari dana giro yang menyumbangkan porsi sebesar 56,74% dari total dana DPK atau sebesar Rp5,49 triliun, Simpanan dalam bentuk Giro di Bank DKI terbagi dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.

Tingkat suku bunga rata-rata giro untuk mata uang Rupiah pada tahun 2008 adalah 4,17% sedangkan untuk mata uang asing adalah sebesar 0,80%. Dari sisi penghimpunan dana perseroan, tabungan menduduki tempat kedua setelah giro dengan jumlah sebesar Rp2,130 triliun per 31 Desember 2008, atau mencakup 22,01% dari jumlah keseluruhan dana pihak ketiga. berikutnya porsi dana deposito merupakan bentuk simpanan dana pihak ketiga baik dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar dengan jangka waktu berkisar antara 1 – 12 bulan. Jumlah penghimpunan dana perseroan dari deposito berjangka per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp2,05 triliun atau mengalami 23% kenaikan dibandingkan Rp1,67 triliun yang dihasilkan pada tahun sebelumnya. Komposisi ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3-1
Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga	2004	Porsi	2005	Porsi	2006	Porsi	2007	Porsi	2008	Porsi
	Rp	%								
Giro	1,872	44.07%	4,288	65.43%	4,050	57.53%	3,819	52.49%	5,492	56.75%
Tabungan	1,011	23.80%	1,077	16.43%	1,328	18.86%	1,785	24.53%	2,130	22.01%
Deposito	1,365	32.13%	1,189	18.14%	1,662	23.61%	1,672	22.98%	2,056	21.24%
Jumlah	4,248	100.00%	6,554	100.00%	7,040	100.00%	7,276	100.00%	9,678	100.00%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2008)

c. Rentabilitas

Bank DKI berhasil meningkatkan pendapatan bunga sebesar 15,29% dari Rp1,2 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp1,4 triliun pada tahun 2008. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan naik sebesar 11,31% dari Rp690,6 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp768,7 pada tahun 2008. Peningkatan pendapatan bunga dari *Call Money* dalam denominasi rupiah juga membukukan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 208,62% dari Rp5,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp17,9 miliar pada tahun 2008.

Seiring dengan meningkatnya dana pihak ketiga Bank DKI, beban bunga yang harus ditanggung meningkat sebesar 20,71% dari Rp478,4 miliar menjadi Rp576,8 miliar. Beban bunga deposito berjangka meningkat 23,27% dari Rp237,6 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp292,9 miliar pada tahun 2008. Sedang beban bunga tabungan meningkat 21,42% dari Rp37,6 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp45,6 miliar pada tahun 2008. Beban bunga dari surat berharga yang dikeluarkan meningkat 114,72% dari Rp63,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp135,7 miliar di tahun berikutnya. Peningkatan ini terkait dengan diterbitkannya obligasi Bank DKI V sejumlah Rp425 miliar dan Obligasi Subordinasi I sebesar Rp325 miliar pada tahun 2008. Obligasi Bank DKI V berjangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun. Obligasi Subordinasi I berjangka waktu sepuluh tahun mempunyai suku bunga tetap 12,25% per tahun untuk lima tahun pertama dan 22,25% per tahun untuk lima tahun berikutnya.

Pada akhir Desember 2008, Bank DKI mencatat keuntungan penilaian efek yang diperdagangkan yang belum direalisasi sebesar Rp708,7 juta, jauh lebih baik dari kerugian Rp86,2 miliar yang dicatat pada akhir Desember 2007. Peningkatan ini mengakibatkan kenaikan signifikan jumlah pendapatan operasional lainnya Bank DKI sebesar 482,39% dari Rp15,9 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp92,6 miliar pada tahun 2008. Selain itu, provisi dan komisi selain dari pemberian kredit meningkat sebesar 45,98% dari Rp8,7 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp12,7 miliar pada tahun 2008.

Beban operasional lainnya meningkat sebesar 17,37% dari Rp472 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp554 miliar di tahun 2008. Beban tenaga kerja meningkat 10,24% dari Rp293 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp323 miliar pada

tahun 2008. Peningkatan beban tenaga kerja berkaitan dengan adanya kenaikan gaji dan upah serta tunjangan dan kesejahteraan karyawan.

Dari hasil pendapatan dan beban di atas, pada tahun 2008, Bank DKI berhasil meningkatkan laba bersih sebelum pajak penghasilan sebesar 14,67% dari Rp150 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp172 miliar di tahun 2008. Laba bersih setelah pajak penghasilan meningkat 61,11% dari Rp72 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp116 miliar di tahun 2008.

d. Manajemen Risiko

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan belakangan ini telah mengalami perkembangan yang pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Industri perbankan. Hal ini menuntut setiap pelaku usaha di Industri perbankan, tidak terkecuali Bank DKI, untuk menerapkan pengelolaan risiko, agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Bank DKI di dalam melakukan pengelolaan risikonya termasuk ke dalam kategori Bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik. Cakupan pengelolaan yang cukup luas dibandingkan dengan bank yang tidak termasuk kompleksitas usaha tinggi merupakan tantangan yang menarik bagi Bank DKI untuk dapat mengelola dengan baik kedelapan jenis risiko tersebut. Pengelolaan kedelapan jenis risiko sedapat mungkin dapat sejalan dengan *Road Map Basel* dan Bank Indonesia.

Sampai dengan saat ini Bank DKI selalu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh *Regulator*. Penerapan pengelolaan risiko dalam kegiatan usaha Bank DKI memberikan manfaat kepada Manajemen melalui peningkatan *shareholder value*, menjelaskan kepada Manajemen kemungkinan kerugian potensial di masa depan. Pengelolaan risiko juga memperbaiki metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi. Konsep tersebut dipergunakan

sebagai metodologi akurat untuk dasar pengukuran efektif risiko yang melekat pada Instrumen dan kegiatan usaha yang relatif kompleks, serta penyediaan infrastruktur pengelolaan risiko yang kokoh dalam upaya meningkatkan daya saing Bank DKI.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangatlah ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan Bank DKI. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/9/PBI/2006, maka Bank DKI telah mengirim para karyawan untuk mengikuti pendidikan manajemen risiko. Peningkatan kompetensi karyawan di bidang manajemen risiko merupakan suatu kewajiban bagi para pejabat bank untuk melalui dan mengikutinya sehingga pada tahun 2010 diharapkan seluruh pejabat Bank DKI memiliki sertifikasi dari GARP (*Global Associations of Risk Professional*) dan BSMR. Untuk itu diperlukan perumusan kebijakan yang bersifat strategis melalui koordinasi lintas unit, lintas fungsional dan melibatkan manajemen Bank DKI. Sarana untuk merumuskan kebijakan tersebut adalah melalui Komite Manajemen Risiko (KMR).

3.6 Obligasi Subordinasi PT. Bank DKI

Bersumber dari Prospektus Penerbitan Obligasi V dan Obligasi I PT. Bank DKI (2008: Hal. 6) Nama obligasi subordinasi yang ditawarkan melalui penawaran umum ini adalah Obligasi Subordinasi I Bank DKI tahun 2008 dengan tingkat bunga tetap. Obligasi subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan pemegang obligasi subordinasi.

Jumlah pokok obligasi subordinasi yang diterbitkan sebesar Rp 325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah). Harga penawaran dari nilai obligasi ini 100% (seratus persen) dari nilai nominal obligasi subordinasi. Bunga obligasi subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung

sejak tanggal pembayaran bunga obligasi subordinasi bunga pertama dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2008 sedangkan pembayaran bunga terakhir pada tanggal 4 Maret 2018, atau pada tanggal 5 Maret 2013 bila perseroan melaksanakan opsi beli.

Jangka waktu obligasi subordinasi adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal emisi, dengan opsi beli (pelunasan awal) pada hari bank pertama setelah ulang tahun ke-5 (kelima) sejak tanggal emisi. Kupon dari obligasi subordinasi I untuk tahun I – V sebesar 12,25 % dan tahun VI – X sebesar 22,25 %. Obligasi subordinasi tidak dijamin dengan agunan khusus, tidak dijamin juga oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau lembaga penjamin lainnya.

Berdasarkan surat PT. Pemingkat Efek Indonesia (Pefindo) No. 663/PEF-Dir/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, hasil pemeringkatan atas obligasi subordinasi adalah *id*BBB. Obligasi subordinasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Struktur Modal PT. Bank DKI

Dalam usaha menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan kegiatan operasionalnya. PT. Bank DKI memerlukan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain dari itu PT. Bank DKI sebagai bank yang beroperasi di Indonesia harus taat pada Peraturan Bank Indonesia dalam hal ini untuk memenuhi Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang memenuhi syarat (*eligible capital*).

Modal inti masih mendominasi struktur modal PT. Bank DKI sampai akhir tahun 2007. Berdasarkan laporan keuangan posisi 31 Desember 2007 jumlah modal inti mencapai Rp711,113 miliar atau 92,59 % dari total modal yang dimiliki PT. Bank DKI sebesar Rp767,980 miliar, Sementara modal pelengkap hanya sebesar Rp56,867 miliar atau 7,41% dari modal inti. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 jumlah modal pelengkap dapat mencapai 100% dari modal inti.

Modal pelengkap yang dimiliki oleh PT. Bank DKI masih bersumber dari cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebesar Rp56,867 miliar. Jumlah ini belum mencapai ketentuan maksimum, yaitu sebesar 1,25% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang berjumlah Rp63,552 miliar. Sedangkan komponen modal pelengkap berupa pinjaman subordinasi sampai dengan akhir tahun 2007 masih nihil. Berikut ini disajikan kondisi permodalan PT. Bank DKI per 31 Desember 2007.

Tabel 4.1.
Komponen Modal PT. Bank DKI Per 31 Desember 2007

No.	Keterangan	Nominal (Rp. Juta)
I	Komponen Modal	
	A. Modal Inti	
	1. Modal Disetor	600.326
	2. Cadangan Tambahan Modal	110.787
	B. Modal Pelengkap	
	1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	0
	2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (maksimum 1.25% dari ATMR)	56.867
	3. Modal Pinjaman	0
	4. Pinjaman Subordinasi (maksimum 50% dari Modal Inti)	0
II	Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	767.980
III	Penyertaan	(927)
IV	Total Modal	767.053
V	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	5.084.228
VI	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	15,09%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal pada akhir Desember 2007 sebesar 15,09 %, angka tersebut masih melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Namun rasio ini hanya memperhitungkan kebutuhan modal untuk risiko kredit, belum memperhitungkan kebutuhan modal untuk risiko pasar. Jumlah ATMR risiko pasar PT. Bank DKI pada akhir Desember 2007 sebesar Rp873.941 juta.

Perhitungan risiko pasar PT. Bank DKI menggunakan metode standar yaitu menghitung risiko suku bunga meliputi risiko spesifik dan risiko umum. Metode perhitungan risiko umum dilakukan dengan menggunakan metode jatuh tempo (maturity method) sesuai dengan PBI No. 9/PBI/2007. Bila risiko pasar diperhitungkan dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, dengan asumsi tidak ada penambahan modal maka rasio kecukupan modal PT. Bank DKI pada akhir tahun 2007 turun menjadi 12,87%. Penurunan ini memang tidak signifikan, akan tetapi jika kondisi ekonomi terus membaik, dan PT. Bank DKI melakukan ekspansi usahanya kemungkinan transaksi-transaksi yang memiliki risiko pasar akan bertambah di kemudian hari.

Tabel 4.2.
Perhitungan CAR dengan Risiko Pasar per 31 Desember 2007

Keterangan	Rp. Juta	
	Tanpa Risiko Pasar	Dengan Risiko Pasar
Modal Inti	711.113	711.113
Modal Pelengkap	56.867	56.867
Penyertaan	(927)	(927)
Total Modal	767.053	767.053
ATMR Risiko Kredit	5.084.228	5.084.228
ATMR Risiko Pasar		873.941
Total ATMR	5.084.228	5.958.169
CAR	15,09%	12,87%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007)

Bila dilihat pada tabel 4-3 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 rasio kecukupan modal PT. Bank DKI selalu mengalami penurunan, untuk menjaga rasio kecukupan modal yang memenuhi syarat dan dalam rangka ekspansi usahanya PT. Bank DKI menerbitkan obligasi subordinasi I.

Tabel 4.3.
Rasio kecukupan modal (CAR) PT. Bank DKI 2004 - 2007

Tahun	2004	2005	2006	2007
CAR	22,87%	19,31%	17,81%	15,09%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2004) dan (2007)

4.2 Penerbitan Obligasi Subordinasi PT. Bank DKI

Obligasi subordinasi (*subordinated debt*) dapat dimasukkan sebagai komponen modal bank, karena memiliki jangka waktu jatuh tempo yang relatif panjang dan permanen. Meskipun demikian instrumen hutang ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *tier 1*, karena pada akhirnya akan jatuh tempo, tidak seperti saham (*common stock*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum pasal 17 ayat 1 modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) di perhitungkan paling tinggi sebesar 50 % dari modal inti.

Obligasi subordinasi yang diterbitkan oleh PT. Bank DKI masuk dalam modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*).

Tabel 4.4.

Perhitungan Kapasitas Penerbitan Obligasi Subordinasi

Keterangan	Aktual 31 Desember 2007 (Rp. Juta)
Modal Inti (Tier 1)	711.113
Modal Pelengkap (Tier 2)	56.867
Penyertaan (deduction)	(927)
Total Modal	767.980
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	5.084.228
C A R	15,09 %
Outstanding Obligasi Subordinasi	0
Maksimum Obligasi Subordinasi	355.556
Kapasitas Penerbitan Obligasi Subordinasi	355.556

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007)

Dengan demikian jumlah obligasi subordinasi yang dapat diterbitkan oleh PT. Bank DKI maksimum sebesar Rp355.556 juta. Sementara sampai dengan akhir tahun 2007 PT. Bank DKI sedang dalam proses penerbitan obligasi subordinasi yang berjumlah Rp325 miliar, sehingga masih terdapat peluang bagi PT. Bank DKI untuk menerbitkan surat berharga tersebut sebesar Rp. 30,556 miliar dengan asumsi tidak ada komponen *tier 2* level bawah lainnya.

4.2.1 Sebelum penerbitan Obligasi Subordinasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 bank diwajibkan untuk menyediakan modal 8% dari ATMR dengan memperhitungkan risiko pasar. Jumlah ATMR risiko kredit pada bulan Desember 2007 adalah sebesar Rp5.084 miliar, sehingga kebutuhan modal minimum untuk risiko kredit adalah $8\% \times \text{Rp}5.084 \text{ miliar} = \text{Rp}407 \text{ miliar}$. Sedangkan kebutuhan modal minimum untuk risiko pasar adalah $8\% \times \text{Rp}874 \text{ miliar} = \text{Rp}70 \text{ miliar}$.

Tabel 4.5.
Perhitungan Modal yang Memenuhi Syarat (*Eligible Capital*)
Per 31 Desember 2007 (Rp. Juta)

Modal Yang Tersedia		ATMR		Beban Modal Minimum 8 %	Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat	
Tier 1	711.113	Kredit	5.084.228	406.738	Tier 1	406.738	Tier 1	462.023
Tier 2	56.867				Tier 2		56.867	
Tier 3					Tier 3			
		Pasar	873.941	69.915	Tier 1	69.915	Tier 1	249.090
					Tier 2			
					Tier 3			
	767.980		5.958.169	476.653	Total	476.653	Total	767.980

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007)

Dalam menghitung kebutuhan modal minimum yang memenuhi syarat, yang pertama kali harus dipenuhi adalah kebutuhan modal untuk risiko kredit. Kebutuhan modal untuk risiko kredit dapat dipenuhi dari modal inti dan modal pelengkap. Data di atas memperlihatkan bahwa kebutuhan modal minimum untuk risiko kredit seluruhnya dapat dipenuhi dari modal inti yang tersedia. Bahkan masih tersisa modal inti yang tidak dipergunakan untuk risiko kredit sebesar Rp304 miliar.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan modal minimum untuk risiko pasar dapat dipenuhi dengan modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan. Modal inti yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal minimum risiko pasar adalah modal inti yang tidak digunakan untuk risiko kredit. Jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk risiko pasar adalah Rp70 miliar, sedangkan modal inti yang masih tersisa adalah Rp304 miliar. Dengan kata lain, kebutuhan modal minimum untuk risiko pasar seluruhnya dapat dipenuhi dengan modal inti.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana menyusun struktur permodalan PT. Bank DKI sehingga seluruh modal yang tersedia dapat diperhitungkan sebagai modal yang memenuhi syarat. Mengingat jumlah modal inti yang tersedia untuk risiko kredit melebihi jumlah kebutuhan modal minimum risiko kredit, maka sebagian modal inti dapat dialokasikan untuk kebutuhan modal risiko pasar. Menurut penjelasan Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 Pasal 8, Ayat 4,

sekurang-kurangnya 28,5% dari risiko pasar diperhitungkan dari modal inti yang tidak digunakan untuk menutup risiko kredit. Artinya PT. Bank DKI harus menyisihkan modal inti sebesar $28,5\% \times \text{Rp}874 \text{ miliar} = \text{Rp}249 \text{ miliar}$ untuk kebutuhan modal risiko pasar. Dengan demikian modal inti yang dapat dialokasikan untuk risiko kredit adalah $\text{Rp}711 \text{ miliar} - \text{Rp}249 \text{ miliar} = \text{Rp}462 \text{ miliar}$. Selain itu, karena seluruh komponen modal yang tersedia dapat diakui sebagai modal yang memenuhi syarat, maka rasio kecukupan modal PT. Bank DKI dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar menjadi 12,87 %.

4.2.2 Setelah penerbitan obligasi subordinasi

Sehubungan dengan persetujuan dari Bank Indonesia bahwa obligasi subordinasi yang diterbitkan PT. Bank DKI dapat diklasifikasikan sebagai modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) yang dapat berfungsi sebagai modal untuk risiko kredit dan risiko pasar, maka pembahasan selanjutnya membandingkan komponen modal, rasio kecukupan modal (CAR) dan modal yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Bank Indonesia sebelum penerbitan obligasi subordinasi dengan data laporan keuangan PT. Bank DKI 31 Desember 2007 dan setelah penerbitan obligasi subordinasi dengan menggunakan laporan keuangan 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009.

Tabel 4.6.
Komponen Modal PT. Bank DKI

I	Komponen Modal	31 Des 07	31 Des 08	30 Juni 09
	A. Modal Inti			
	1. Modal Disetor	600.326	600.325	600,325
	2. Cadangan Tambahan Modal	110.787	153.795	211,456
	B. Modal Pelengkap			
	1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	0	0	0
	2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (maksimum 1.25% dari ATMR)	56.867	78.165	74,092
	3. Modal Pinjaman	0	0	0
	4. Pinjaman Subordinasi (maksimum 50% dari Modal Inti)	0	323.455	260,000
II	Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	767.980	1.155.740	1,145,873
III	Penyertaan	(927)	(927)	(927)
IV	Total Modal	767.053	1.154.813	1,144,946

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007), (2008) dan (2009)

Modal per 31 Desember 2007 berjumlah Rp767.980 juta yang terdiri dari Rp711.113 modal inti atau 92,59 % dari total modal dan Rp56.867 juta modal pelengkap 7,80 % dari modal inti, sedangkan sesuai peraturan Bank Indonesia jumlah modal pelengkap dapat mencapai 100 % dari modal inti.

Modal PT. Bank DKI per 31 Desember 2008 setelah adanya penerbitan obligasi menjadi sebesar Rp1.155.740 juta yang terdiri dari Rp754.120 juta modal inti atau sebesar 65,25% dari total modal dan modal pelengkap sebesar Rp401.620 juta atau sebesar 53,25% dari modal inti. Modal pelengkap ini terdapat modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) sebesar Rp323.455 juta atau sebesar 42,89% dari modal modal inti, nilai tersebut setelah dikurangi amortisasi biaya penerbitan obligasi subordinasi, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Sementara modal PT. Bank DKI per 30 Juni 2009 sebesar Rp1.145.873 juta yang terdiri dari Rp811.781,- juta modal inti atau sebesar 70,84% dari total modal dan modal pelengkap sebesar Rp334.092 juta atau sebesar 41,15% dari modal inti. Pada modal pelengkap ini terdapat modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) sebesar Rp260.000 juta atau sebesar 32,03% dari modal inti, yang juga merupakan obligasi subordinasi yang sudah dikurangi amortisasi.

Tabel 4.7.
CAR PT. Bank DKI

Keterangan	31 Des 07	31 Des 08	30 Juni 09
Modal Inti	711.113	754.120	811.781
Modal Pelengkap	56.867	401.620	334.092
Penyertaan	(927)	(927)	(927)
Total Modal	767.053	1.154.813	1.144.946
ATMR Risiko Kredit	5.084.228	6.710.530	7.587.946
ATMR Risiko Pasar	873.941	1.741.575	1.132.785
Total ATMR	5.958.169	8.452.105	8.720.746
CAR Kredit	15,09%	17,21%	15,09%
CAR Kredit	12,87%	13,66%	13,13%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007), (2008) dan (2009)

Setelah penerbitan obligasi subordinasi, CAR PT. Bank DKI dengan memperhitungkan risiko kredit per 31 Desember 2008 17,21%, naik sebesar 2,12% dari 31 Desember 2007, sedangkan CAR per 30 Juni 2009 15,09% sama dengan CAR per 31 Desember 2007. CAR tersebut turun dikarenakan nilai ATMR kredit yang meningkat. CAR PT. Bank DKI dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar per 31 Desember 2008 adalah 13,66% naik sebesar 0,79% dari CAR per 31 Desember 2007, sedangkan per 30 Juni 2009 adalah 13,13% atau naik sebesar 0,26% dari 31 Desember 2008.

Tabel 4.8.

Modal yang Memenuhi Syarat (*Eligible Capital*)

31 Desember 2007				31 Desember 2008				30 Juni 2009			
Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat		Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat		Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat	
Tier 1	406.738	Tier 1	462.023	Tier 1	536.842	Tier 1	257.772	Tier 1	607,037	Tier 1	488,937
Tier 2		Tier 2	56.867	Tier 2		Tier 2	401.620	Tier 2		Tier 2	334,092
Tier 3		Tier 3		Tier 3		Tier 3		Tier 3		Tier 3	
Tier 1	69.915	Tier 1	249.090	Tier 1	139.326	Tier 1	496.348	Tier 1	90,623	Tier 1	322,844
Tier 2		Tier 2		Tier 2		Tier 2		Tier 2		Tier 2	
Tier 3		Tier 3		Tier 3		Tier 3		Tier 3		Tier 3	
Total	476.653	Total	767.980	Total	676.168	Total	1.155.740	Total	697,660	Total	1,145,873

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007), (2008) dan (2009)

Per 31 Desember 2008 modal minimum untuk memenuhi syarat dengan menghitung ATMR risiko kredit minimal adalah sebesar Rp536.842 juta sedangkan modal yang tersedia sebesar Rp659.392 juta terdiri dari modal inti sebesar Rp257.772 juta dan modal pelengkap Rp496.348 juta, sedangkan jika dengan menghitung ATMR risiko kredit dan risiko pasar, modal minimum untuk memenuhi syarat sebesar Rp139.326 juta sedangkan modal yang tersedia adalah sebesar Rp496.348 juta ini sesuai penjelasan Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 Pasal 8, Ayat 4, sekurang-kurangnya 28,5% dari risiko pasar sebesar Rp1.741.575 juta. Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa seluruh modal yang dimiliki oleh PT. Bank DKI dapat digolongkan menjadi Modal Yang Memenuhi Syarat.

Per 30 Juni 2009, modal minimum untuk memenuhi syarat dengan menghitung ATMR risiko kredit adalah minimal sebesar Rp607.037 juta sedangkan modal yang tersedia sebesar Rp823.029 juta terdiri dari modal inti sebesar Rp488.937 juta dan modal pelengkap Rp334.092 juta. Sedangkan jika dengan menghitung ATMR risiko kredit dan risiko pasar modal minimum untuk memenuhi syarat sebesar Rp90.623 juta sedangkan modal yang tersedia adalah sebesar Rp322.844 juta.

4.2.3 Asumsi bila tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi

Obligasi subordinasi PT. Bank DKI diterbitkan untuk menambah modal dan seluruhnya dapat digunakan untuk ekspansi pemberian kredit, namun pada tahun 2008 terdapat krisis ekonomi global yang mempengaruhi kondisi perekonomian, sehingga PT. Bank DKI mengalami kesulitan dalam menyalurkan kredit. Untuk dapat mengoptimalkan dana hasil penerbitan obligasi tersebut PT. Bank DKI menempatkan dana hasil penerbitan obligasi subordinasi pada instrumen yang memiliki *margin risk* 0% (nol persen).

Dalam perhitungan modal yang memenuhi syarat untuk modalnya dikurangi dengan obligasi subordinasi yang diterbitkan dan untuk ATMR tidak mengalami perubahan karena dana hasil penerbitan obligasi subordinasi ditempatkan pada instrumen yang memiliki *margin risk* 0% (nol persen), dengan asumsi komponen-komponen lain yang terdapat pada modal sesuai dengan

laporan keuangan per 31 Desember 2008 dan 30 Juni 2009. Modal yang dimiliki PT. Bank DKI tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, per 31 Desember 2008 modal minimum yang dialokasikan untuk risiko kredit harusnya Rp536.842 juta tapi PT. Bank DKI hanya dapat mengalokasikan sebesar Rp335.937 juta, demikian juga pada 30 Juni 2009 .

Tabel 4.9.

Modal yang Memenuhi Syarat (Eligible Capital) dengan Asumsi tidak menerbitkan obligasi subordinasi

31 Desember 2008				30 Juni 2009			
Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat		Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat	
Tier 1	536.842	Tier 1	257.772	Tier 1	607,037	Tier 1	488,937
Tier 2		Tier 2	78.165	Tier 2		Tier 2	74,092
Tier 3		Tier 3		Tier 3		Tier 3	
Tier 1	139,326	Tier 1	496,348	Tier 1	90,623	Tier 1	322,844
Tier 2		Tier 2		Tier 2		Tier 2	
Tier 3		Tier 3		Tier 3		Tier 3	
Total	676.168	Total	1.155.740	Total	697,660	Total	1,145,873

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2008) dan (2009)

4.3 Keuangan PT. Bank DKI

Dalam pembahasan selanjutnya untuk melihat kondisi keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerbitan obligasi subordinasi menggunakan data keuangan penting PT. Bank DKI yang berasal dari laporan keuangan PT. Bank DKI periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2009 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Laporan keuangan per 31 Desember 2006 (disajikan kembali) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar, sedangkan Laporan keuangan per 31 Desember 2007 (disajikan kembali) dan Laporan keuangan per 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang.

4.3.1 Pendapatan Bunga

Tabel 4.10.

Komposisi Pendapatan dan Beban Bunga untuk periode yang berakhir 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 2007, 2006 (dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007*	2006*
Pendapatan Bunga				
- Bunga	793.690	1.391.071	1.208.316	1.170.309
- Provisi dan Komisi Kredit	24.567	33.965	27.866	24.626
Jumlah Pendapatan Bunga	818.257	1.425.036	1.236.182	1.194.935
Beban Bunga				
- Bunga	409.168	752.613	564.313	674.466
- Provisi dan Komisi		11	11	134
Jumlah Beban Bunga	409.168	752.624	564.324	674.600
Pendapatan Bunga Bersih	409.089	672.412	671.858	520.335

*Disajikan kembali

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007), (2008) dan (2009)

Pendapatan bunga PT. Bank DKI per 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp818.045 juta. Pendapatan bunga per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.425.036 juta, atau meningkat sebesar Rp188.854 juta dari pendapatan bunga per 31 Desember 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan bunga yang berasal dari surat-surat berharga. Pada pendapatan bunga tahun 2007 sebesar Rp1.236.182 juta terdapat peningkatan sebesar Rp41.247 juta dari tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan bunga yang berasal dari Kredit.

4.3.2 Beban Bunga

Jumlah beban bunga PT. Bank DKI per 30 Juni 2009 sebesar 409.168. Jumlah beban bunga PT. Bank DKI pada tahun 2008 sebesar Rp752.624 juta, meningkat sebesar Rp188.300 juta atau sebesar 33,37% dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar Rp564.324 juta. Peningkatan jumlah beban ini terutama didominasi

oleh peningkatan beban bunga dari obligasi yang diterbitkan oleh PT. Bank DKI. Beban bunga dari surat berharga per 31 Desember 2008 sebesar Rp.135.724 Juta meningkat 114,79% dari 31 Desember 2007 yaitu sebesar 63.187 juta.

Sementara itu, beban bunga per 31 Desember 2007 Rp564.324 mengalami penurunan sebesar Rp110.275 juta, dari 31 Desember 2006 yaitu sebesar Rp674,600 juta. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan tingkat bunga giro, tabungan dan deposito berjangka.

4.3.3 Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih PT. Bank DKI per 30 Juni 2009 sebesar Rp409.089 juta. Pendapatan bunga bersih PT. Bank DKI pada tahun 2008 sebesar Rp672.412 juta hanya meningkat sebesar Rp554 juta atau sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp.671.858. meskipun pada awal tahun 2008 PT. Bank DKI telah menerbitkan obligasi subordinasi yang dimaksudkan selain untuk menambah modal juga digunakan untuk ekspansi kreditnya, namun hal tersebut belum dapat direalisasikan karena pada pertengahan tahun 2008 ada ancaman dari kondisi ekonomi global yang berimbas kepada ekonomi dan moneter Indonesia. Peningkatan pendapatan bunga bersih PT. Bank DKI pada tahun 2007 sebesar Rp151.523 juta atau sebesar 29,12% dibandingkan tahun 2006 yang bernilai Rp520.335.

4.3.4 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya

Tabel 4.11.**Pendapatan (Beban) Operasional lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007*	2006*
Provisi/Komisi diterima selain dari pemberian kredit	30.331	12.695	8.719	9.580
Pendapatan Transaksi Mata Uang Asing - Bersih	3.397	(176)	(346)	(379)
Keuntungan (Kerugian) Penilaian Efek yang Diperdagangkan yang Belum Direalisasi - Bersih	14.819	708	(86.180)	23.597
Keuntungan Penjualan Efek - Bersih		17.703	36.133	9.876
Lain-lain - Bersih	25.952	61.655	57.582	49.505
Beban PPAP	(43.165)	(53.987)	(60.278)	(78.536)
Beban (Pemulihan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	1.097	1.104	(3.318)	4.041
Beban <i>Overhead</i>	(280.470)	(553.685)	(472.040)	(384.566)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya-Bersih	(250.235)	(516.191)	(513.092)	(374.966)

*Disajikan kembali

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007), (2008) dan (2009)

Jumlah beban operasional PT. Bank DKI per 30 Juni 2009 sebesar Rp250.235 juta., sedangkan jumlah beban operasional lainnya PT. Bank DKI pada 31 Desember 2008 sebesar Rp.516.191 juta, meningkat sebesar Rp3.099 juta atau sebesar 0,60% dibandingkan 31 Desember 2007 yaitu sebesar Rp513.092 juta. Peningkatan ini terutama didominasi oleh jumlah peningkatan beban over head pada tahun 2008 sebesar Rp81.645 juta atau 17,30% dibandingkan tahun 2007. Jumlah beban operasional lainnya PT. Bank DKI pada 31 Desember 2007 juga meningkat sebelumnya sebesar Rp138.126 juta atau sebesar 36,84% dibandingkan 31 Desember 2006 yaitu sebesar Rp384.566 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan Kerugian penilaian efek yang diperdagangkan yang belum direalisasi sebesar Rp109.777 juta, atau sebesar 465,22%.

4.3.5 Laba (Rugi) Operasional

Laba dari kegiatan operasional per 30 Juni sebesar Rp158.856 juta. Laba dari kegiatan operasional PT. Bank DKI tahun 2008 sebesar Rp156.221 juta, turun sebesar Rp2.545 juta atau setara dengan 1,60% dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar Rp158.766 juta. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dari penerbitan surat-surat berharga dan beban over head.

Laba dari kegiatan operasional PT. Bank DKI tahun 2007 sebesar merupakan peningkatan sebesar Rp13.396 juta atau sebesar 9,21% dibandingkan tahun 2006 yaitu sebesar Rp145.370 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga yang berasal dari kredit dan juga adanya penurunan tingkat bunga giro, tabungan dan deposito.

4.3.6 Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih PT. Bank DKI per 31 Juni 2009 adalah sebesar Rp157.079 juta. Laba bersih pada tiga tahun sebelumnya per 31 Desember 2008, 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 berturut-turut adalah sebesar Rp116.408, Rp72.391 dan Rp 70.592 atau mengalami peningkatan yang terus-menerus.

4.3.7 Kredit Yang Diberikan

Tabel 4.12.

**Total Kredit Yang Telah Disalurkan PT. Bank DKI
Periode 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007*	2006*
Kredit yang diberikan	6.720.495	6.477.383	5.010.451	3.688.792
Penyisihan penghapusan	(269.166)	(229.909)	(233.803)	(162.517)
Kredit yang diberikan - bersih	6.451.329	6.247.474	4.776.648	3.526.275

*Disajikan kembali

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007), (2008) dan (2009)

Total kredit yang diberikan bersih per 30 Juni 2009 sebesar Rp6.451.329, per 30 Juni 2009 kredit yang diberikan meningkat Rp243.112 dari 31 Desember 2008, sedangkan penyisihan penghapusan kredit sudah mencapai Rp269.166, hal

tersebut dikarenakan masih adanya dampak dari krisis ekonomi global, sehingga PT. Bank DKI mengalami kesulitan untuk menyalurkan kredit.

Kredit yang diberikan bersih setelah dikurangi penyisihan penghapusan per 31 Desember 2008 sebesar Rp6.247.474 meningkat Rp1.470.826 atau sebesar 30,79% dibandingkan 31 Desember 2007 yaitu sebesar Rp4.776.648. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp1.466.932 dan menurunnya penyisihan penghapusan. Sedangkan pada 31 Desember 2007 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2006 kredit yang diberikan-bersih mengalami peningkatan Rp1.250.373 atau sebesar 35,46%.

4.3.8 Kualitas aktiva (*Assets Quality*)

Tabel 4.13.
Kualitas Aktiva PT. Bank DKI

Tahun	NPL-net	NPL-gross	Pemenuhan PPA
30 Juni 2009	2,63%	5,75%	115,70%
31 Desember 2008	2,05%	4,92%	111,48%
31 Desember 2007*	0,74%	4,15%	100,44%
31 Desember 2006*	1,08%	4,55%	101,13%

*Disajikan kembali

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007),(2008) dan (2009)

Dari 31 Desember 2006 sampai dengan 30 Juni 2009 NPL cenderung meningkat akibat menurunnya kualitas kredit yang diberikan, kualitas kredit menurun akibat adanya Kenaikan harga minyak pada tahun 2006-2008 perlu digaris bawahi harga minyak sempat menyentuh USD 147/barel, walaupun kenaikan harga BBM subsidi tdk terlalu tinggi (Rp 6.500/liter) tetapi harga minyak industri di Indonesia mengikuti harga pasar internasional. Dilanjutkan dengan terjadinya krisis akibat *subprime mortgage* pada tahun 2008-2009 yang berimbas terhadap aktifitas perekonomian nasional.

Kenaikan rasio pemenuhan PPA dari 2007 sampai dengan 2009 adalah karena kebijakan internal bank sebagai persiapan menghadapi krisis *subprime mortgage* untuk mengantisipasi pemburukan kualitas kredit (persiapan mengantisipasi kredit macet). PT. Bank DKI memperhitungkan, selisih PPA yang

wajib dibentuk tersebut yang sebesar 11% diperkirakan cukup untuk mengantisipasi meningkatnya kredit macet.

4.3.9 *Earnings* (Profitabilitas/Rentabilitas)

Tabel 4.14.
Profitabilitas PT. Bank DKI

Tahun	Rasio Laba terhadap	Rasio Laba terhadap	NIM	Rasio Beban Operasional
	Rata-rata Aktiva	Ekuitas		terhadapPendapatan
	(ROA)	(ROE)		Operasional (BOPO)
30 Juni 2009	2,31%	26,91%	6,58%	82,21%
31 Desember 2008	1,41%	15,04%	6,22%	89,71%
31 Desember 2007*	1,39%	9,61%	6,99%	88,14%
31 Desember 2006*	1,31%	10,70%	6,43%	88,71%

*Disajikan kembali

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007), (2008) dan (2009)

Rasio imbal hasil (rentabilitas) aktiva (ROA) PT. Bank DKI per 30 Juni 2009 sebesar 2,31%, Per 31 Desember 2008 rasio imbal hasil aktiva sebesar 1,41% mengalami kenaikan 0,02% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2007 yaitu sebesar 1,39%, kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada laba sebelum pajak sebesar 14,25%. Laba sebelum pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp171.947 juta meningkat Rp.21.449 juta dari tahun 2007 sebesar Rp. 150.498 juta. Sedangkan untuk ROA tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,26% dari tahun 2006 yaitu sebesar 1,31%, penurunan ini disebabkan karena terjadi penurunan pada laba sebelum pajak sebesar 18,95%, meskipun rata rata total asetnya mengalami peningkatan sebesar 13,63%.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) PT. Bank DKI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar 26,91%. Per 31 Desember 2008 rasio imbal hasil ekuitas sebesar 15,04% mengalami kenaikan sebesar 5,43% dari tahun 2007 yaitu sebesar 9,61%, Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan laba setelah pajak sebesar 10,47% dan adanya peningkatan rata-rata equity sebesar 2,83%, Sedangkan untuk tahun 2007 mengalami penurunan dari tahun 2006

sebesar 1,09% karena adanya penurunan laba sebelum pajak sebesar 22,66% dan peningkatan rata-rata equity sebesar 14,08%.

Peningkatan yang signifikan pada ROA dan ROE per 30 Juni 2009 karena adanya peningkatan pendapatan komisi yang diperoleh atas keberhasilan PT. Bank DKI dalam menghimpun dana untuk pembiayaan program 10.000 MW PT. PLN pada bulan Mei 2009.

Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2009 sebesar 6,58%, dari angka tersebut menunjukkan tidak ada peningkatan yang signifikan dari pendapatan bunga bersih, karena Kredit yang diberikan PT. Bank DKI cenderung tidak mengalami peningkatan, sementara penyisihan penghapusan kredit sampai 30 Juni 2009 sebesar Rp269.166 sudah melebihi angka per 31 Desember 2007 sebesar Rp229.909. Per 31 Desember 2008 rasio NIM sebesar 6,22% mengalami penurunan sebesar 0,77% dari 31 Desember 2007 yaitu sebesar 6,99%, hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bunga bersih hanya sebesar 0,08%, nilai tersebut lebih didominasi oleh pendapatan dari surat berharga yang dimiliki PT. Bank DKI, sementara rata-rata aktiva produktif meningkat sebesar 12,49%.

Sedangkan NIM untuk 31 Desember 2007 terdapat peningkatan 0,56% dari 31 Desember 2006 sebesar 6,43%. Peningkatan NIM ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih yang dihasilkan oleh peningkatan pada pendapatan bunga yang diperoleh dari kredit dan juga adanya penurunan beban bunga giro, tabungan dan deposito.

Rasio BOPO pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar 82,21%, rasio BOPO PT. Bank DKI cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan peningkatan total beban operasional lebih tinggi dari peningkatan total pendapatan operasional. Pada 31 Desember 2008 rasio BOPO sebesar 89,71% mengalami kenaikan sebesar 1,57% dari tahun 2007 yaitu 88,14%, hal ini disebabkan oleh peningkatan peningkatan total beban operasional sebesar 15,40% dan peningkatan total pendapatan operasional 13,39%. Sedangkan rasio BOPO 31 Desember 2007 mengalami penurunan sebesar 0,57% dari 31 Desember 2006 sebesar 88,71% hal ini disebabkan karena peningkatan total beban operasional sebesar 3,30% dan peningkatan total pendapatan operasional sebesar 3,97%.

4.3.10 *Loan Deposit Ratio (LDR)*

Tabel 4.15.
LDR PT. Bank DKI

Tahun	Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)
30 Juni 2009	57,31%
31 Desember 2008	66,98%
31 Desember 2007*	68,58%
31 Desember 2006*	52,40%

*Disajikan kembali

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank DKI (2007), (2008) dan (2009)

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun dari pihak ketiga (LDR) per 30 Juni 2009 mencapai 57,31%. LDR per 31 Desember 2008 sebesar 66,98% mengalami penurunan sebesar 1,60% dari tahun 2007 yaitu 68,58%, hal ini dikarenakan terdapat peningkatan kredit sebesar 29,92% dan peningkatan dana pihak ketiga sebesar 33,03%. Sedangkan LDR per 31 Desember 2007 mengalami kenaikan 16,16% dari 31 Desember 2006 yaitu sebesar 52,40%, hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan kredit sebesar 18,48% dan peningkatan dana pihak ketiga sebesar 3,36%.

Dari rasio LDR tersebut, sejak awal tahun 2008 PT. Bank DKI mengalami kesulitan dalam menyalurkan kreditnya, hal itu terlihat dari persentase peningkatan kredit selalu lebih kecil dari persentase peningkatan dana pihak ketiga, ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih mengalami dampak dari krisis ekonomi global pada tahun 2008.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Obligasi Subordinasi yang diterbitkan PT. Bank DKI sudah memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. dapat diklasifikasikan sebagai modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) yang dapat berfungsi sebagai modal untuk risiko kredit dan risiko pasar. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum pasal 17 ayat 1 modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) di perhitungkan paling tinggi sebesar 50 % dari modal inti. Obligasi subordinasi yang diterbitkan PT. Bank DKI sebesar Rp325 miliar, sedangkan jumlah obligasi subordinasi yang dapat diterbitkan oleh PT. Bank DKI maksimum sebesar Rp355.556 juta. sehingga masih terdapat peluang bagi PT. Bank DKI untuk menerbitkan surat berharga tersebut sebesar Rp. 30,556 miliar.

Dampak dari penerbitan obligasi subordinasi terhadap permodalan PT. Bank DKI, dapat menambah modal, dapat terpenuhinya perhitungan modal yang memenuhi syarat dan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR). Modal PT. Bank DKI sebelum penerbitan obligasi subordinasi per 31 Desember 2007 sebesar Rp767.980 ,- juta yang terdiri dari Rp711.113 juta modal inti (atau 92,59 % dari total modal) dan Rp.56.867 juta modal pelengkap (7,80 % dari modal inti).

Modal PT. Bank DKI setelah penerbitan obligasi subordinasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.155.740 juta yang terdiri dari Rp.754.120,- juta modal inti atau sebesar 65,25% dari total modal dan modal pelengkap sebesar Rp401.620 juta atau sebesar 53,25% dari modal inti. Modal pelengkap ini terdapat modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) sebesar Rp323.455 Juta atau sebesar 42,89% dari modal modal inti, nilai tersebut setelah dikurangi amortisasi biaya penerbitan obligasi subordinasi.

Modal PT. Bank DKI per 30 Juni 2009 setelah adanya penerbitan obligasi menjadi sebesar Rp1.145.873 juta yang terdiri dari Rp811.781,- juta modal inti atau sebesar 70,84% dari total modal dan modal pelengkap sebesar Rp334.092 juta atau sebesar 41,15% dari modal inti. Modal pelengkap ini terdapat modal

pelengkap level bawah (*lower tier 2*) sebesar Rp260.000 juta atau sebesar 32,03% dari modal inti.

Sebelum penerbitan obligasi subordinasi PT. Bank DKI harus menyediakan modal minimum untuk risiko kredit per 31 Desember 2007 sebesar Rp406.738 juta, modal yang tersedia Rp462.023 juta dari modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp56.867. Untuk pemenuhan modal minimum risiko pasar PT. Bank DKI harus menyediakan modal minimum sebesar Rp69.915 juta, sedangkan modal yang tersedia sebesar Rp249.090 yang merupakan modal inti. setelah penerbitan obligasi subordinasi untuk pemenuhan modal minimum risiko kredit per 31 Desember 2008 PT. Bank DKI harus menyediakan modal sebesar Rp536.842 juta sedangkan modal yang tersedia sebesar Rp659.392 juta terdiri dari modal inti sebesar Rp257.772 juta dan modal pelengkap Rp496.348 juta. untuk pemenuhan modal minimum risiko pasar PT. Bank DKI harus menyediakan sebesar Rp139.326 juta dan modal yang tersedia sebesar Rp496.348 juta yang merupakan modal inti.

Per 30 Juni 2009 modal minimum untuk memenuhi risiko kredit sebesar Rp607.037 juta sedangkan modal yang tersedia sebesar Rp823.029 juta terdiri dari modal inti sebesar Rp488.937 juta dan modal pelengkap Rp334.092 juta. Modal minimum untuk risiko pasar sebesar Rp90.623 juta sedangkan modal yang tersedia sebesar Rp322.844 juta yang merupakan modal inti.

CAR per 31 Desember 2007 untuk risiko kredit sebesar 15,09% sedangkan CAR yang memperhitungkan risiko kredit dan pasar sebesar 12,87%, angka tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan Bank Indonesia yaitu minimal 8%. CAR PT. Bank DKI setelah menerbitkan obligasi subordinasi per 31 Desember 2008 dengan memperhitungkan risiko kredit 17,21% naik sebesar 2,12% dari 31 Desember 2007 dan CAR PT. Bank DKI per 30 Juni 2009 adalah 15,09% sama dengan CAR per 31 Desember 2007. CAR PT. Bank DKI dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar per 31 Desember 2008 13,66% naik sebesar 0,79% dari 31 Desember 2007 dan per 30 Juni 2009 13,13% naik sebesar 0,26% dari 31 Desember 2007.

Sebelum penerbitan obligasi subordinasi kondisi keuangan PT. Bank DKI per 31 Desember 2007 bila dibandingkan 31 Desember 2006 terdapat peningkatan

pendapatan bunga terutama disebabkan oleh pendapatan bunga yang berasal dari Kredit, hal ini juga diikuti penurunan jumlah beban bunga yang disebabkan karena adanya penurunan tingkat bunga giro, tabungan dan deposito berjangka. Kredit yang diberikan setelah dikurangi penyisihan penghapusan meningkat 35,46%. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun dari pihak ketiga (LDR) meningkat 16,16%.

Setelah penerbitan obligasi subordinasi kondisi keuangan PT. Bank DKI per 31 Desember 2008 bila dibandingkan 31 Desember 2007 terdapat peningkatan pendapatan bunga terutama disebabkan oleh surat-surat berharga meskipun demikian peningkatan tersebut juga seiring dengan peningkatan jumlah beban bunga dari obligasi subordinasi yang diterbitkan oleh PT. Bank DKI. Penurunan pendapatan bunga yang berasal dari kredit setelah penerbitan obligasi subordinasi dikarenakan pada pertengahan tahun 2008 terjadi krisis global, sehingga PT. Bank DKI mengalami kesulitan untuk menyalurkan kredit. Kredit yang diberikan setelah dikurangi penyisihan penghapusan hanya meningkat 30,79%. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun dari pihak ketiga (LDR) mengalami penurunan 1,60%.

Dampak yang signifikan atas penambahan modal melalui penerbitan obligasi subordinasi adalah tercapainya pemenuhan modal yang memenuhi syarat (*eligible capital*). Dengan asumsi bila PT. Bank DKI tidak menerbitkan obligasi subordinasi pada tahun 2008, maka modal yang dimiliki PT. Bank DKI tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga PT. Bank DKI tidak dapat melakukan ekspansi kredit dan surat berharga karena adanya keterbatasan modal yang tersedia.

5.2 Saran

PT. Bank DKI dapat menerbitkan obligasi subordinasi sampai Rp355.556 juta per 31 Desember 2007 yaitu 50% (lima puluh persen) dari modal inti dan pada 3 Maret 2008 PT. Bank DKI menerbitkan obligasi subordinasi sebesar Rp.325 miliar. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi subordinasi tersebut dapat digunakan untuk pemberian kredit, apabila penerbitan obligasi subordinasi ditujukan sebagai penambah modal. Untuk penerbitan obligasi subordinasi

selanjutnya, dalam menentukan jumlah nominal yang akan diterbitkan, ada baiknya PT. Bank DKI memproyeksikan kondisi perekonomian sampai jangka waktu obligasi subordinasi tersebut karena akan berpengaruh dalam mengoptimalkan dana hasil penerbitan obligasi subordinasi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Tim Arsitektur Perbankan Indonesia. (2007). Program Kegiatan Arsitektur Perbankan Indonesia
<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/api18.htm>
- Best, Philip. (1998). *Impelementing Value at Risk*. John Willey & Sons Ltd.
- Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. (2009). Kajian Stabilitas Keuangan No. 13 September 2009.
<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Kajian+Stabilitas+Keuangan/ksk_130909.htm>
- Laporan Tahunan (Annual Report), PT Bank DKI tahun 2004.
- Laporan Tahunan (Annual Report), PT Bank DKI tahun 2005.
- Laporan Tahunan (Annual Report), PT Bank DKI tahun 2006.
- Laporan Tahunan (Annual Report), PT Bank DKI tahun 2007.
- Laporan Tahunan (Annual Report), PT Bank DKI tahun 2008.
- Laporan Tengah Tahunan, PT Bank DKI tahun 2009.
- Matten, Chris. (2000). *Managing Bank Capital: Capital Allocation and Performance Measurement*, 2nd Ed. John Willey & Sons, Ltd.
- Prabowo, Tjondro. (2003). Analisa Pengaruh Perubahan Struktur Modal dan Imunisasi Suku Bunga akibat Penerbitan Obligasi Subordinasi. *Thesis Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Prospektus Penerbitan Obligasi V dan Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

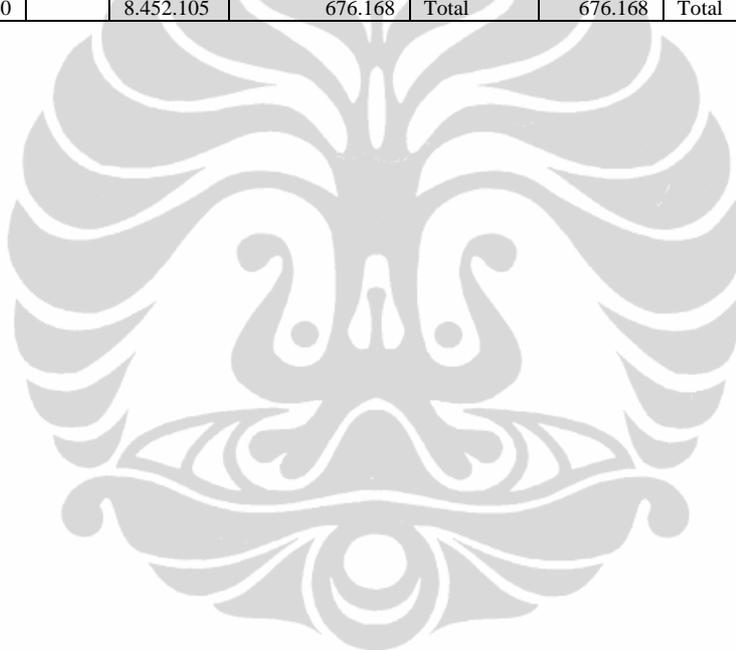
Supriyono, Bambang. (2009). Analisa Pengaruh Penerbitan Obligasi Subordinasi Terhadap Struktur Modal PT. Bank DKI dan Terhadap Biaya Dana. *Thesis Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada*.

Syahruzad, Edwin. (2003). Manfaat dan Risiko Suku Bunga Penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perbankan. Jakarta.



**Lampiran 1. Perhitungan Modal yang Memenuhi Syarat per 31 Desember
2008**

Modal Yang Tersedia		ATMR		Beban Modal Minimum 8 %	Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat	
Tier 1	754.120	Kredit	6.710.530	536.842	Tier 1	536.842	Tier 1	257.772
Tier 2	401.620				Tier 2		401.620	
Tier 3					Tier 3			
		Pasar	1.741.575	139.326	Tier 1	139.326	Tier 1	496.348
					Tier 2			
					Tier 3			
	1.155.740		8.452.105	676.168	Total	676.168	Total	1.155.740



Lampiran 2. Perhitungan Modal yang Memenuhi Syarat per 30 Juni 2009

Modal Yang Tersedia		ATMR		Beban Modal Minimum 8 %	Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat	
Tier 1	811,781	Kredit	7,587,961	607,037	Tier 1	607,037	Tier 1	488,937
Tier 2	334,092				Tier 2		334,092	
Tier 3					Tier 3			
		Pasar	1,132,785	90,623	Tier 1	90,623	Tier 1	322,844
					Tier 2			
					Tier 3			
	1,145,873		8,720,746	697,660	Total	697,660	Total	1,145,873

Lampiran 3. Perhitungan Modal yang memenuhi syarat per 31 Desember 2008 dengan asumsi PT. Bank DKI tidak menerbitkan obligasi subordinasi

Modal Yang Tersedia		ATMR		Beban Modal Minimum 8 %	Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat	
Tier 1	754.120	Kredit	6.710.530	536.842	Tier 1	536.842	Tier 1	257.772
Tier 2	78.165				Tier 2		78.165	
Tier 3					Tier 3			
		Pasar	1.741.575	139.326	Tier 1	139.326	Tier 1	496.348
					Tier 2			
					Tier 3			
	831.358		8.452.105	676.168	Total	676.168	Total	1.155.740

**Lampiran 4. Perhitungan Modal yang memenuhi syarat per 30 Juni 2009
dengan asumsi PT. Bank DKI tidak menerbitkan obligasi
subordinasi**

Modal Yang Tersedia		ATMR		Beban Modal Minimum 8 %	Modal Minimum Untuk Memenuhi Syarat		Modal Yang Memenuhi Syarat	
Tier 1	811,781	Kredit	7,587,961	607,037	Tier 1	607,037	Tier 1	488,937
Tier 2	74,092				Tier 2		74,092	
Tier 3					Tier 3			
		Pasar	1,132,785	90,623	Tier 1	90,623	Tier 1	322,844
					Tier 2			
					Tier 3			
	1,145,873		8,720,746	697,660	Total	697,660	Total	1,145,873